

34**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF
DI KABUPATEN NABIRE****Petrus Tekege****Dosen Fisip Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire****(Naskah diterima: 12 Agustus 2018, disetujui: 12 Oktober 2018)****Abstract**

At present the region must conduct its own planning, implementation, and supervision activities. With the increasing workload, human resources must be prepared, both in quantity and quality, meaning that empowerment of the community must be the main priority. Whereas in terms of financing sources, regions are required to be able to finance most activities, so that again creative human resources are needed that can generate thoughts, concepts, and policies. As for the flow of thought in this study, which concerns independent variables namely the role of village officials with the indicators are Coordinator (X1), Motivator (X2) and Communicator (X3). While the dependent variable is Community Empowerment with its indicators are Education (Y1), Economy (Y2), Health (Y3). The role of village officials with three indicators, namely: Facilitator, Motivator, and Communicator. An in-depth study of the role of village officials in community empowerment in a scientific study.

Keywords: *village officials; Community empowerment; Apparatus Facilitator, Apparatus Motivator, and Apparatus Communicator.*

Abstrak

Sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya, artinya bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas yang utama. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan pemikiran, konsep, dan kebijakan. Adapun alur pikir pada penelitian ini, yang menyangkut variabel bebas yakni Peran Aparat Kampung dengan indikatornya adalah Koordinator (X1), Motivator (X2) dan Komunikator (X3). Sedangkan variabel terikat yakni Pemberdayaan Masyarakat dengan indikatornya adalah Pendidikan (Y1), Ekonomi (Y2), Kesehatan (Y3). Peranan Aparat Kampung dengan tiga indikator yakni : Fasilitator, Motivator, dan Komunikator. Kajian dalam tentang peran aparat kampung terhadap pemberdayaan masyarakat dalam sebuah kajian ilmiah.

KataKunci: Aparat kampung; Pemberdayaan Masyarakat; Fasilitator, Motivator, dan Komunikator Aparatur.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi khusus provinsi Papua yang telah dimulai sejak 2001 me-ngandung konsekuensi yang cukup “menan-tang” bagi daerah. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangun-an, dan masih banyak yang lain.

Pembangunan secara menyeluruh tidak terlepas dari program pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat di suatu wilayah akan merasakan hasil-hasil pembangunan jika program pemberdayaan berjalan dengan baik. Sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya, artinya bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas yang utama. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan

pemikiran, konsep, dan kebijakan. Dengan lahirnya otonomi khusus serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Proses pemberdayaan masyarakat saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pemberdayaan yang berakar dari bawah (grassroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan kampung di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur kampung harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir.

Usaha untuk menggalakkan pemberdayaan masyarakat kampung yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat kampung yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga kampung. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga kampung. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga kampung menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat kampung. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga kampung akan pentingnya usaha-usaha pemberdayaan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat banyak tergantung pada kemampuan pemimpin kampung kepemimpinan aparat pemerintah kampung dan Kepala Kampung. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala kampung dan aparat kampung sebagai

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah

pimpinan pemerintah kampung atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah kampung menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam segala segi kehidupan.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Ada banyak kasus yang terjadi di Kampung Wanggar Makmur yang menunjukkan peran aparat kampung kurang maksimal terhadap pemberdayaan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari beberapa hal yang penulis jumpai di kampung Wanggar Makmur seperti :

1. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh aparat kampung Wanggar Makmur kepada masyarakat dalam hal keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Tingkat komunikasi yang dibangun antara aparat kampung dengan masyarakat masih kurang, sehingga masyarakat selalu pasif.
3. Aparat kampung kurang menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kurangnya kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan terutama kegiatan-kegiatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, seperti kewirausahaan,

penyuluhan-penyuluhan pertanian dan peternakan. Pemberdayaan dibidang kesehatan seperti penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik. Pemberdayaan dibidang pendidikan seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang baik, infrastruktur pendidikan yang baik dan program-program pendidikan luar sekolah yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat.

II. KAJIAN TEORI

Menurut Irawan Soehartono teori adalah merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. (Irawan Soehartono, 2004 : 6).

2.1 Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan

kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.2 Pemerintah Desa.

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah , desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 2 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah).

Pada awalnya, sebelum terbentuknya sistem pemerintahan yang menguasai seluruh bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara,

urusan-urusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara turun temurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan (dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

Dalam pasal 8 ayat (2) UU No.6 tahun 2014 tentang desa dikatakan bahwa desa

dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan dan potensi desa.. Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Bagian Wilayah Kerja, Perangkat, dan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

2.3 Tugas Pemerintahan Desa

Pemerintah merupakan salah satu organisasi formal dalam pemerintahan sehingga pemerintah memiliki tugas dan fungsi formal di wilayah desa. Menurut Athoilah (2010:172) bahwa "organisasi formal diikat oleh suatu persyaratan formal dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai tugas pemerintahan yang diembanya" Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa dalam pemerintahan terdapat pembagian tugas masing-masing memiliki fungsi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya pula.

Desa memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparatnya dengan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati (Widjaja, 2003:3). Kepala desa merupakan pemegang kendali pembangunan pemerintahan sehingga dapat

memberikan kontribusi dalam kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa diuraikan tugas pemerintah desa yaitu: a) koordinasi perkembangan pembangunan yang ada di desa, b) koordinasi penduduk yang masuk keluar desa, c) koordinasi program pelayanan masyarakat, d) koodinasi bantuan pelayanan masyarakat miskin dan e) pembuatan Jurnal dan Laporan Keadaan Desa kepada Kecamatan.

2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan. yang dalam bahasa Inggris adalah "*empowerment*" dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdaya dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain atau lembaga sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya.

Mardikanto (2012:27) mengemukakan bahwa "pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan

aktivitasnya" Berdasarkan teori tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lingkungannya.

Mardikanto (2012:28) menjelaskan bahwa pemberdayaan dalam sebuah pemerintahan merupakan proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi memenuhi kehidupannya dalam bentuk keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupannya.

2.5 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pendekatan adalah suatu teknik dan cara yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Teknik dan cara tersebut dan harus diikuti oleh semua pihak dalam suatu pekerjaan karena berkenaan dengan sistem dan prosedur yang telah disepakati bersama. Pendekatan berkenaan pula dengan implementasi penetapan tujuan, sistem dan pengembangan sebuah pekerjaan (Mardikato, 2012:159)

Menurut Mardikanto (2012:161) bahwa "Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas: a) pendekatan partisipatif, b) pendekatan kesejahteraan dan c) pendekatan pembangunan berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, menggunakan Metode Deskriptif dengan alasan bahwa penulis ingin mengumpulkan informasi yang actual secara lebih rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik – praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi. lokasi dalam penelitian ini adalah Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Masyarakat kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire yang berjumlah 1. 648 orang, sampel berjumlah 50 orang, terdiri dari Aparat Kampung 6 orang, Bamuskam 5 orang, 3 orang kepala dusun, 18 orang ketua-ketua RT, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya 18 orang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menyajikan data yang telah terkumpul berdasarkan daftar pertanyaan yang telah penulis ajukan kepada

responden sebanyak 50 orang tentang Peranan Aparat Kampung dengan tiga indikator yakni : Fasilitator, Motivator, dan Komunikator. Sesuai dengan jawaban responden yang telah terkumpul berdasarkan daftar pertanyaan yang penulis sebariskan lewat kuisioner dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini, sesuai dengan indikator-indikatornya.

Fasilitator.

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang aparat kampung memfasilitasi kegiatan kampung

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Selalu	21	42%
b	Kadang –	22	44%
c	Kadang Tidak Pernah	7	14%
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 21 responden atau 42% menyatakan aparat kampung selalu memfasilitasi kegiatan kampung, dan sebanyak 22 responden atau 44% menyatakan kadang – kadang, serta 7 responden atau 14% yang menjawab bahwa aparat kampung tidak pernah memfasilitasi kegiatan kampung.

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang fasilitas yang disiapkan sesuai dengan harapan masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Sesuai	8	16 %
b	Kurang Sesuai	29	58 %
c	Tidak Sesuai	13	26 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 8 responden atau 16% menyatakan bahwa fasilitas yang disiapkan oleh aparat kampung sesuai dengan harapan masyarakat, dan sebanyak 29 responden atau 58% menyatakan kurang sesuai, serta 13 responden atau 26% yang menjawab tidak sesuai.

Motivator

Tabel 3.Tanggapan Responden Tentang motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Sering	11	22 %
b	Kadang –	23	46 %
c	Kadang Tidak Pernah	16	32 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 3 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 11 responden atau 22% menyatakan bahwa aparat kampung sering memberikan motivasi kepada masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan sebanyak 23 responden atau 46% menyatakan kadang – kadang, serta 16 responden atau 32% yang menjawab tidak pernah.

Tabel 4.Tanggapan Responden Tentang Bimbingan dan Arahan kepada Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Sering	3	6 %
b	Kadang	33	66 %
c	– Kadang Tidak Pernah	14	28 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 4.4 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 3 responden atau 6% menyatakan aparat kampung sering memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat, dan sebanyak 33 responden atau 66% menyatakan kadang – kadang, serta 14 responden atau 28% yang menjawab tidak pernah.

Pendidikan

Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang akses pendidikan yang layak

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
----	------------------	-----------	------------

a	Sudah	7	14 %
b	Layak	29	58 %
c	Kurang Layak Tidak Layak	14	28 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 7 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 7 responden atau 14% menyatakan bahwa anak-anak mereka sudah mendapatkan akses pendidikan yang layak, 29 responden atau 58% menyatakan kurang layak dan 14 responden atau 28% menyatakan tidak layak.

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Baik	5	10 %
b	Kurang	33	66 %
c	Baik Tidak Baik	12	24 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 8 tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada 5 responden atau 10% menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di kampung Wanggar Makmur sudah baik dan sebanyak 33 responden atau 66% menyatakan kurang baik

ada serta 12 responden atau 24% menyatakan tidak baik.

Ekonomi

Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Selalu	3	6 %
b	Kadang-	27	54 %
c	Kadang Tidak Pernah	20	40 %
Jumlah		50	100

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 9 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 3 responden atau 6% menyatakan bahwa selalu ada kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, 27 responden atau 54% menyatakan kadang-kadang, serta 20 responden atau 40% yang menjawab tidak pernah.

Tabel 7.Tanggapan Responden Tentang bantuan pemerintah kampung

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Selalu	12	24 %
b	ada	22	44 %
c	Kadang-Kadang Tidak Pernah	16	32 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 10 tersebut diatas dapat diketahui bahwa 12 responden atau 24% menyatakan bahwa masyarakat selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah kampung untuk meningkatkan kesejahteraan, sebanyak 22 responden atau 44% menyatakan kadang-kadang, serta 16 responden atau 32% yang menjawab tidak pernah

Kesehatan

Tabel 8. Tanggapan Responden Tentang Pelayanan terhadap Kesehatan Masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
a	Selalu	11	22 %
b	Kadang-	24	48 %
c	Kadang Tidak Pernah	15	30 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 11 tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada 11 responden atau 22% menjawab bahwa masyarakat selalu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, 24 responden atau 48 % menjawab kadang-kadang dan 15 orang responden atau 30% menyatakan tidak pernah.

Tabel 9. Tanggapan Responden terhadap kondisi saran dan prasarana kesehatan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
----	------------------	-----------	------------

a	Baik	10	20 %
b	Kurang	31	62 %
c	Baik Tidak Baik	9	18 %
Jumlah		50	100 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Primer

Dari data pada tabel 12 tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada 10 responden atau 20% menjawab bahwa kondisi sarana dan prasarana kesehatan baik, 31 responden atau 62 % menjawab kurang baik dan ada 9 responden atau 18% menyatakan tidak baik.

Analisis Data

Berdasarkan hasil Quisioner yang telah dibuat dalam bentuk tabel-tabel pada penyajian data penulis akan melakukan analisis terhadap data – data yang telah terkumpul diatas dengan mengambil prosentase terbesar atau terkecil saja, sebagai berikut :

Peran Aparat Kampung (Variabel Bebas)

Dari data yang terkumpul untuk indikator fasilitator pada pertanyaan pertama (tabel 1) tentang aparat kampung memfasilitasi setiap kegiatan kampung nampak bahwa dari 50 responden ada 22 responden atau 44% yang merupakan jawaban terbanyak mengatakan bahwa aparat kampung hanya kadang-kadang saja memfasilitasi kegiatan – kegiatan di kampung Wanggar Makmur. Hal ini

menunjukkan bahwa peran aparat kampung sebagai fasilitator terutama memfasilitasi kegiatan-kegiatan di kampung Wanggar Makmur masih kurang. Hal ini disebabkan karena kondisi kampung Wanggar Makmur yang masih mengalami keterbatasan sumber-sumber daya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya difasilitasi oleh kampung, melainkan lewat swadaya masyarakat.

Selanjutnya pada tabel 2 tentang fasilitas yang disiapkan telah sesuai dengan harapan masyarakat nampak dari 50 responden, sebagian besar responden yakni 29 orang atau 58% menjawab bahwa fasilitas yang disiapkan kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fasilitas yang disiapkan oleh aparat kampung masih banyak yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Fasilitas yang disiapkan kurang sesuai dengan harapan masyarakat karena aparat kampung kurang memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, selain itu juga karena keterbatasan yang dimiliki oleh kampung untuk menyediakan fasilitas yang baik kepada masyarakat. Dari dua tabel ini (1 dan 2) terlihat bahwa peran aparat kampung sebagai fasilitator belum maksimal dijalankan. Diharapkan kepada aparat kampung dengan

adanya alokasi dana desa sekarang yang jumlahnya cukup besar, agar dapat digunakan dengan baik untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kampung.

Indikator Motivator pada pertanyaan pertama (tabel 3) tentang motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi, menunjukkan bahwa dari 50 responden terdapat 23 responden atau 46% yang menyatakan aparat kampung kadang-kadang memberikan motivasi kepada masyarakat. Dan 16 responden (32%) juga menyatakan tidak pernah memberikan motivasi. Data ini menunjukkan bahwa aparat kampung masih sangat kurang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampung. Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang karena masing-masing masyarakat lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pribadi yang merupakan mata pencahariannya. Aparat kampung kurang menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam segala bentuk kegiatan-kegiatan di kampung Wanggar Makmur. Hanya beberapa orang saja yang terlihat selalu aktif terlibat dalam pembangunan kampung. Kurang adanya Sosialisasi dari kepala kampung maupun

aparatus kampung tentang program-program kegiatan di kampung, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu.

Selanjutnya pada pertanyaan kedua tabel 4 tentang bimbingan dan arahan kepada masyarakat, terlihat bahwa sebagian besar responden dari 50 orang yakni 66% atau 33 orang mengatakan bahwa kepala kampung dan aparatus kampung hanya kadang-kadang memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran aparatus kampung atau tugas aparatus kampung dalam hal mengarahkan dan membimbing masyarakat masih kurang. Kondisi ini terjadi karena perhatian aparatus kepada masyarakat sangat kurang, dan kurang peka terhadap kondisi kekurangan yang dimiliki masyarakat.

Indikator komunikator yakni komunikasi diantara aparatus kampung pada tabel 5, terlihat bahwa dari 50 responden, sebagian besar yakni 35 responden 70% menjawab bahwa diantara aparatus kampung kadang-kadang terjalin komunikasi yang baik. Ada 13 responden menyatakan ada komunikasi yang baik. Sedangkan yang menyatakan tidak ada komunikasi hanya 2 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi diantara aparatus kampung sudah berjalan namun belum maksimal dilaksanakan. Dan selanjutnya pada

pertanyaan kedua tabel 6, tentang komunikasi antara aparatus kampung dengan masyarakat dari 50 responden, ada 36 responden atau 72% mengatakan bahwa komunikasi yang baik antara aparatus kampung dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan kampung kadang-kadang dilaksanakan. 11 responden menyatakan selalu ada komunikasi yang baik dan hanya 3 orang responden yang mengatakan tidak pernah ada komunikasi yang baik antara aparatus kampung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi diantara aparatus kampung dengan masyarakat sudah berjalan namun belum terjadi maksimal.

Pemberdayaan Masyarakat (Variabel Terikat)

Dari data yang diperoleh untuk indikator Pendidikan pada tabel 7, tentang akses pendidikan yang layak di kampung Wanggar Makmur sebagian besar responden yakni 29 orang (58%) mengatakan bahwa akses pendidikan kurang layak. Hanya 7 responden yang menyatakan sudah layak. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di kampung Wanggar Makmur masih kurang layak. Akses pendidikan di kampung Wanggar Makmur hanya sampai pada tingkat menengah pertama (SLTP). Sehingga warga kampung Wanggar Makmur yang ingin melanjutkan

studi keningkat yang lebih tinggi harus keluar kampung. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Akses untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ini terasa sangat sulit bagi warga yang tidak memiliki kendaraan sehingga harus berjalan kaki yang jaraknya cukup jauh. Atau ada yang harus meninggalkan kampung dan tinggal bersama keluarga lainnya yang jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Karena keterbatasan ini menyebabkan banyak warga kampung yang putus sekolah karena akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sangat memberatkan. Selain itu jumlah tenaga pengajar baik secara kuantitas maupun kualitas yang masih kurang. Tidak tersedianya sarana rumah dinas bagi para guru yang tinggal jauh membuat tingkat disiplin gurupun rendah.

Pada pertanyaan kedua tabel 8, tentang kondisi sarana dan prasarana bidang pendidikan di kampung Wanggar Makmur, dari 50 responden, sebagian besar responden yakni 33 responden atau 66% menjawab bahwa sarana dan prasarana pendidikan di kampung Wanggar Makmur masih kurang baik. Hal ini terlihat dari kondisi fisik bangunan-bangunan sekolah yang ada di kampung Wanggar Makmur ada terjadi kerusakan dibeberapa bagian. Juga fasilitas

penunjang lainnya seperti mebeler, pagar, dan fasilitas lainnya masih sangat kurang. Tenaga pendidik juga masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Indikator bidang Ekonomi pada tabel 9, tentang kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dari 50 responden sebagian besar responden atau 27 orang (54%) menyatakan bahwa program-peningkatan pendapatan masyarakat kadang-kadang dilaksanakan. Hal ini berarti belum maksimalnya kegiatan kewirausahaan yang dilakukan di kampung Wanggar Makmur. Pada tabel 10 tentang bantuan dari pemerintah kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagian besar masyarakat atau responden menjawab bahwa mereka kadang-kadang mendapatkan bantuan sebanyak 22 responden (44%). Dari data ini menunjukan bahwa masih ada masyarakat juga yang belum merasakan mendapatkan bantuan dari pemerintah kampung.

Pelayanan kesehatan ada 24 responden atau 48% yang merupakan jumlah jawaban terbanyak menyatakan bahwa masyarakat kadang-kadang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih kurang. Selanjutnya pada tabel 4.12

tentang kondisi sarana dan prasarana kesehatan dari 50 responden 31 responden atau 62% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kampung Wanggar Makmur kurang baik. Dari kedua data yang tersaji pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik. Terlihat dari kurangnya tenaga medis yang melayani masyarakat kampung Wanggar Makmur. Dan juga tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Kampung Wanggar Makmur belum memiliki puskesmas. Yang ada hanya satu posyandu dan satu PUSTU. Itupun dalam keadaan yang rusak. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat kampung tidak dilaksanakan secara rutin, dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik masyarakat harus mendapatkannya ditempat lain diluar kampung Wanggar Makmur.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat membuat beberapa kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut : Peran aparat kampung sebagai Fasilitator masih kurang terutama dalam hal memfasilitasi kegiatan-kegiatan

yang ada di kampung Wanggar Makmur. Kurangnya motivasi dari aparat kampung terhadap masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pembangunan. Kurangnya arahan dan bimbingan dari aparat kampung kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Komunikasi diantara aparat kampung dan juga antara aparat kampung dengan masyarakat sudah berjalan namun belum maksimal terutama berkaitan dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akses pendidikan yang sulit terutama pendidikan tingkat atas hingga pendidikan tinggi. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang kurang baik. Pelayanan kesehatan yang kurang maksimal yang dirasakan oleh masyarakat. Kurangnya program-program pemberdayaan ekonomi di kampung Wanggar Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, 1978. *Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dayan, Anto. 1993. *Pengantar Metode Statistik, LP3ES*, Jakarta.
- Dedy Supriady Bratakusuma, Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Depdikbud RI,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Balai Pustaka, Jakarta.

Effendi dan Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei* (LP3ES, Jakarta 1989).

Handayaniingrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung. Jakarta.

Husaini Usman, dan Purnomo. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Hubeis SV. Aida, dkk, (ED). 1992. *Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI* (PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.

Irawan Soehartono. 2004. *Metodologi Penelitian social*. Remaja Rosdakraya. Bandung.

Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka. Jakarta.